

## Praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam Keberlanjutan Destinasi Pariwisata Religi di Kebumen

### Environmental, Social, and Governance (ESG) Practices in the Sustainability of Religious Tourism Destinations in Kebumen

Hendri Hermawan Adinugraha<sup>1) a)\*</sup>, Muhammad Khoirul Fikri<sup>2) b)</sup>, Rizky Andrian<sup>3) c)</sup>

<sup>1)</sup> Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

a) Jl. Pahlawan KM 5, Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161

<sup>2)</sup> Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

b) Jl. Pahlawan KM 5, Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161

<sup>3)</sup> Universiti Utara Malaysia

c) Sintok, 06010 Bukit Kayu Hitam, Kedah, Malaysia

\*Email: hendri.hermawan@uingusdur.ac.id

Naskah Masuk: 26 Juni 2025 Naskah Revisi: 31 Oktober 2025 Naskah Diterima: 27 November 2025

#### ABSTRACT

*This study aimed to analyze the application of Environmental, Social, and Governance (ESG) values in the management of religious tourism destinations in Kebumen. Using a descriptive qualitative, data were collected through participatory observation, in-depth interviews, and documentation studies at religious tourism sites. The results indicated that ESG implementation remains partial: the social aspect demonstrates significant community involvement but lacks inclusivity; the environmental aspect is often neglected, particularly in waste management and resource conservation; while religious values dominate the governance aspect, it lacks transparent and participatory managerial systems. These findings indicated a gap between the potential of local spirituality and systematic sustainability practices. The implications of this research included the need for policy design that integrates ESG into community-based strategic tourism planning. The originality of this research lies in its integration of religious values with ESG principles to develop adaptive and inclusive destination governance within the local context of Kebumen Regency. The integrated ESG model combined spiritual values and local wisdom in three dimensions of sustainability: religious ethics-based environmental conservation, community-based inclusive social empowerment, and participatory and transparent governance, achieved through collaboration between the government, religious leaders, and local communities in Kebumen.*

**Keywords:** environment, governance, religious tourism, social.

#### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan nilai Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan destinasi wisata religi di Kebumen. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi di lokasi-lokasi utama wisata religi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ESG masih parsial: aspek sosial menunjukkan keterlibatan masyarakat cukup tinggi, namun belum inklusif; aspek lingkungan cenderung diabaikan, terutama dalam pengelolaan limbah dan konservasi sumber daya; sementara aspek governance didominasi oleh nilai religius tetapi belum diimbangi oleh sistem manajerial yang transparan dan partisipatif. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi spiritualitas lokal dan praktik keberlanjutan yang sistematis. Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa usulan model integratif ESG berbasis kearifan lokal dan Spiritual Ecosystem Services sebagai pendekatan alternatif dalam pengembangan destinasi religi. Implikasi riset ini mencakup perlunya desain kebijakan yang mengintegrasikan ESG dalam perencanaan strategis pariwisata berbasis komunitas. Originalitas penelitian ini terletak pada penyatuan nilai religius dengan prinsip ESG untuk membangun tata kelola destinasi yang adaptif dan inklusif. Model ESG integratif yang ditemukan menggabungkan nilai spiritual dan kearifan lokal dalam tiga dimensi keberlanjutan yaitu konservasi lingkungan berbasis etika religius, pemberdayaan sosial inklusif berbasis komunitas, tata kelola partisipatif dan transparan melalui kolaborasi pemerintah, tokoh agama, masyarakat lokal di Kebumen.*

**Kata kunci:** lingkungan, pariwisata religi, sosial, tata kelola.

**PENDAHULUAN**

Kebumen, sebuah kabupaten di pesisir selatan Provinsi Jawa Tengah, memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata religi yang berkelanjutan. Beberapa destinasi religi seperti Makam Wali Syekh Maulana Malik Ibrahim, Masjid Agung Kauman, dan berbagai pesantren tua yang sarat nilai spiritual menjadi magnet bagi wisatawan domestik dan regional. Akan tetapi, keberlanjutan destinasi-destinasi tersebut menghadapi tantangan kompleks akibat tekanan lingkungan, dinamika sosial, dan lemahnya tata kelola (Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, 2025). Saat ini, para pemangku kepentingan global, mulai dari investor hingga wisatawan, semakin menjadikan metrik keberlanjutan sebagai syarat mutlak. Krisis iklim telah meningkatkan risiko fisik terhadap situs-situs bersejarah, sementara ketimpangan sosial dan skandal tata kelola dapat merusak reputasi dan memicu boikot

wisatawan, menjadikan keterlambatan adopsi kerangka kerja keberlanjutan bukan lagi opsi, melainkan ancaman finansial dan eksistensial bagi pariwisata Kebumen. Dalam hal inilah, pendekatan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menjadi relevan sebagai kerangka evaluasi dan pengembangan yang lebih komprehensif dalam manajemen destinasi pariwisata religi (Rocca & Zielinski, 2022; Yuan et al., 2023; Legendre et al., 2024). Pendekatan ini dipilih karena ESG menawarkan kerangka kerja yang terukur, terintegrasi, dan holistik, berbeda dengan inisiatif *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang cenderung bersifat filantropis dan terpisah, atau tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang luas. ESG secara spesifik menerjemahkan prinsip keberlanjutan menjadi metrik risiko dan peluang investasi yang secara langsung dinilai oleh pasar, menjadikannya kunci untuk transisi menuju pariwisata yang benar-benar resilien dan kompetitif.

**Tabel 1.**

Data Kunjungan Wisata Religi dan Indikator ESG di Kabupaten Kebumen

Tahun	Jumlah Wisatawan Religi	Ketersediaan Fasilitas Ramah Lingkungan (%)	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan (%)	Skor Tata Kelola (Governance)*
2019	27.600	40%	30%	2,7 dari 5
2020	12.400	42%	25%	2,5 dari 5
2021	18.900	45%	29%	2,6 dari 5
2022	30.500	46%	32%	2,8 dari 5
2023	36.800	48%	33%	2,9 dari 5

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen (2024)

Tabel 1 menunjukkan bahwa data kunjungan wisatawan religi di Kabupaten Kebumen menunjukkan pemulihan yang kuat pasca-pandemi, melonjak dari titik terendah 12.400 kunjungan di tahun 2020 menjadi 36.800 kunjungan di tahun 2023 (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebumen, 2024). Namun, pertumbuhan kunjungan ini harus dicermati seiring dengan tren tiga pilar keberlanjutan yang diukur melalui kerangka *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

Dari aspek Lingkungan (E), yang diukur dari persentase Ketersediaan Fasilitas Ramah Lingkungan, meliputi ketersediaan sarana pengelolaan limbah, konservasi energi/air, dan infrastruktur hijau lainnya terjadi peningkatan perlahan dari 40% (2019) menjadi 48% (2023). Angka ini mengindikasikan bahwa lebih dari separuh destinasi (52%) masih kekurangan fasilitas esensial untuk meminimalisir dampak

lingkungan, yang menjadi tantangan besar dalam mencapai kelestarian.

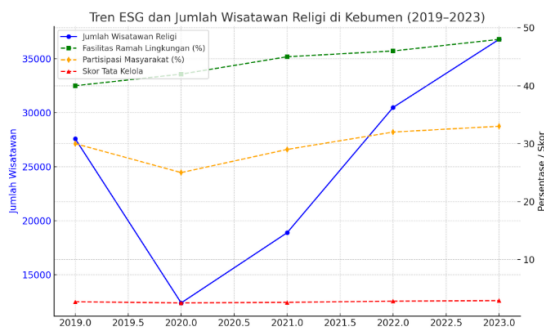
Pada pilar Sosial (S), yang diukur dari persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan mencakup keterlibatan aktif komunitas lokal dalam perencanaan dan manfaat ekonomi destinasi menunjukkan peningkatan dari 30% (2019) menjadi 33% (2023) (setelah sempat anjlok di 2020). Capaian 33% ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif dan kepemilikan masyarakat lokal masih tergolong rendah, berpotensi menghambat keberlanjutan sosial destinasi yang erat kaitannya dengan nilai-nilai spiritual.

Pilar Tata Kelola (G), yang diukur melalui Skor Tata Kelola (1-5) mencakup transparansi, akuntabilitas, dan kapasitas kelembagaan menjadi perhatian terbesar. Dengan skor tertinggi hanya 2,9 dari 5 di tahun 2023, menunjukkan bahwa kualitas tata kelola secara konsisten berada dalam kategori Kurang/Cukup

Rendah (2,0–2,9). Kesenjangan tata kelola ini mengindikasikan bahwa fondasi manajemen, koordinasi antar-pihak, dan kerangka kebijakan yang kuat untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial masih lemah, yang pada akhirnya berisiko menghambat percepatan perbaikan di pilar E dan S, serta mengancam daya tahan pariwisata religi Kebumen dalam jangka panjang.

Skor Tata Kelola (*Governance*) diambil dari indeks internal Dinas Pariwisata yang mengukur transparansi, koordinasi antar pemangku kepentingan, dan sistem pengawasan berbasis indikator *Good Governance*.

Berikut adalah grafik yang menunjukkan tren jumlah wisatawan religi dan indikator ESG (fasilitas ramah lingkungan, partisipasi masyarakat, dan skor tata kelola) di Kabupaten Kebumen dari tahun 2019 hingga 2023. Grafik ini menggambarkan dinamika perkembangan destinasi wisata religi dan menunjukkan pentingnya pendekatan keberlanjutan berbasis ESG.



Gambar 1.

Tren ESG dan Jumlah Wisatawan di Kebumen  
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen (2024)

Fenomena di atas menunjukkan bahwa lonjakan wisatawan belum dibarengi dengan peningkatan signifikan dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola destinasi. Inilah yang menjadikan penting untuk mengkaji penerapan praktik ESG dalam kajian pariwisata religi di Kebumen, guna mengoptimalkan keberlanjutan jangka panjang dan meningkatkan daya saing destinasi. ESG merupakan kerangka kerja strategis yang telah digunakan luas dalam dunia bisnis dan investasi, dan kini mulai diadopsi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan (Tong et al., 2022; Dempere & Modugu, 2022).

Urgensi penelitian ini semakin mengemuka mengingat masih minimnya kajian yang mengintegrasikan pendekatan ESG ke dalam pengelolaan destinasi wisata religi,

khususnya di daerah yang berbasis komunitas seperti Kebumen. Selama ini, penelitian pariwisata religi lebih banyak terfokus pada aspek spiritualitas, potensi budaya, atau promosi destinasi (Juliana et al., 2023). Padahal, tantangan nyata di lapangan melibatkan keberlanjutan lingkungan (misalnya pengelolaan sampah peziarah), ketimpangan sosial (minimnya pelibatan warga lokal), dan lemahnya *Governance* (tidak adanya standar atau indikator keberlanjutan) (Rhama, 2022).

Problem riset yang muncul adalah absennya integrasi praktik ESG secara sistematis dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi wisata religi di Kebumen. Gap riset yang teridentifikasi meliputi ketiadaan instrumen evaluasi ESG yang kontekstual terhadap nilai-nilai lokal, lemahnya keterlibatan aktor-aktor lokal dalam proses *Governance*, serta tidak optimalnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pengelola wisata, dan komunitas keagamaan dalam menjamin keberlanjutan destinasi. Oleh karena itu, perlu adanya model pendekatan ESG yang tidak hanya adaptif terhadap literatur lokal, tetapi juga responsif terhadap tantangan pembangunan pariwisata berbasis nilai spiritual.

Kajian ini memanfaatkan teori *Sustainable Tourism Development* serta kerangka ESG dari World Economic Forum (2024) sebagai landasan teoritik. Teori ini menekankan bahwa pariwisata yang berkelanjutan harus mempertimbangkan keterkaitan antara konservasi lingkungan, pembangunan sosial, dan tata kelola yang efektif (Jung et al., 2024). Dalam kajian wisata religi, teori tersebut diperluas dengan pendekatan *Spiritual Ecosystem Services* (SES) yang melihat bahwa destinasi religi bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga sumber nilai transendental dan kohesi sosial (Mihalic, 2024).

Beberapa riset terdahulu yang relevan telah dilakukan, di antaranya oleh Adinugraha et al. (2023) yang mengkaji keberlanjutan wisata halal berbasis komunitas, serta penelitian dari Sholehuddin et al. (2021) yang menyoroti tata kelola berbasis nilai kearifan lokal di destinasi religi di Indonesia. Akan tetapi, kajian-kajian tersebut belum mengaitkan secara eksplisit penerapan prinsip ESG dalam kebijakan dan praktik di lapangan. Demikian pula, pendekatan ESG dalam wisata religi di kabupaten tingkat dua seperti Kebumen masih sangat minim, baik dalam literatur nasional maupun internasional.

Padahal, tantangan tata kelola dan keterbatasan sumber daya di tingkat lokal membutuhkan model yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis nilai.

Pendekatan ESG penting dalam konteks pariwisata religi karena ia merupakan kerangka atau standar yang digunakan untuk menilai tanggung jawab dan keberlanjutan pengelolaan pariwisata religi di Kabupaten Kebumen. Pendekatan ESG bertujuan untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang bisnis, mengurangi risiko non-keuangan (seperti reputasi dan hukum), menarik investor yang peduli pada dampak sosial dan lingkungan, dan memberi nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Oleh karena itu, menerapkan pendekatan ESG dalam pengelolaan obyek wisata religi sangat penting agar kegiatan wisata tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian alam, nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual di Kabupaten Kebumen.

Riset ini menjadi penting karena dapat memberikan kontribusi pada pengembangan model pengelolaan destinasi wisata religi berbasis ESG yang kontekstual. Kajian ini diharapkan mampu memberi arah kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam program pengembangan pariwisata. Di sisi lain, penelitian ini berpotensi menjadi rujukan ilmiah bagi pengelola wisata religi, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi dalam merancang intervensi berbasis data dan teori yang kuat. Pada kajian global, penelitian ini juga relevan sebagai bagian dari pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan ke-11 (kota dan komunitas berkelanjutan) dan ke-12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab) (Adinugraha, Nasarruddin, Shulthoni, et al., 2023).

Integrasi praktik ESG dalam pengelolaan destinasi wisata religi mampu menciptakan keseimbangan antara spiritualitas, keberlanjutan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat (Khusairi et al., 2023). Oleh karena itu, kajian ini bukan sekadar mengevaluasi praktik yang ada, tetapi juga berupaya membangun kerangka kerja konseptual dan aplikatif yang mampu menjembatani nilai-nilai religius dengan prinsip keberlanjutan global. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk

menganalisis penerapan praktik ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dalam keberlanjutan destinasi wisata religi di Kabupaten Kebumen, serta merumuskan strategi pengelolaan yang adaptif terhadap tantangan lokal dan sejalan dengan prinsip keberlanjutan global.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep ESG dalam Pembangunan Berkelanjutan**

Kajian tentang keberlanjutan dalam pariwisata telah berkembang secara signifikan dalam dua dekade terakhir. Dalam kerangka tersebut, pendekatan ESG (*Environmental, Social, and Governance*) menjadi salah satu dimensi penting yang semakin diperhatikan, terutama dalam praktik pembangunan berkelanjutan termasuk di sektor pariwisata. ESG merupakan suatu pendekatan evaluatif yang mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan, kontribusi sosial, serta tata kelola yang baik sebagai satu kesatuan prinsip keberlanjutan (Lin et al., 2024; García et al., 2024). Prinsip ESG pada destinasi wisata religi mampu memberi arah baru dalam merancang tata kelola yang tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomi dan spiritual, tetapi juga pada keberlangsungan ekosistem, inklusivitas sosial, serta kepemimpinan kolaboratif.

### **Dimensi *Environmental* dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Religi**

Dimensi *Environmental* dalam ESG mencakup perlindungan terhadap sumber daya alam, pengelolaan limbah, efisiensi energi, serta mitigasi dampak negatif terhadap lingkungan. Isu ini pada wisata religi menjadi krusial karena kegiatan peziarahan yang masif dapat menghasilkan volume sampah tinggi, tekanan terhadap kawasan konservasi, serta pencemaran air dan udara (Khan et al., 2021). Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan yang berbasis prinsip konservasi dan teknologi ramah lingkungan sangat diperlukan agar destinasi tidak mengalami degradasi ekologis.

### **Dimensi *Social* dalam Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal**

Dimensi *Social* merujuk pada relasi antara destinasi dengan masyarakat lokal, mencakup aspek inklusi sosial, keadilan ekonomi, pelestarian budaya, serta pemberdayaan

komunitas (Solazzo et al., 2022). Dalam pariwisata religi, masyarakat lokal sering menjadi pelaku utama yang menopang operasional destinasi, baik sebagai penjaga situs, penyedia jasa akomodasi, maupun pelaku ekonomi informal. Akan tetapi, tanpa sistem sosial yang adil dan partisipatif, mereka rentan mengalami marginalisasi akibat komersialisasi pariwisata yang eksploitatif (Mandić & Kennell, 2021). Pendekatan ESG mendorong pentingnya menciptakan relasi yang adil antara pemangku kepentingan, serta memastikan masyarakat lokal memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dari pengembangan wisata religi.

### **Dimensi *Governance* dalam Tata Kelola Destinasi Pariwisata**

Dimensi *Governance* dalam ESG menekankan pentingnya tata kelola yang akuntabel, transparan, partisipatif, dan adaptif. *Governance* dalam pariwisata tidak hanya terkait regulasi, tetapi juga mencakup distribusi peran antaraktor, sistem koordinasi, serta mekanisme kontrol sosial dan institusional. Penelitian oleh Lestari et al. (2022) menunjukkan bahwa tata kelola destinasi pariwisata yang baik akan meningkatkan kapasitas adaptif komunitas dalam menghadapi tekanan eksternal seperti krisis ekonomi, bencana, atau konflik sosial. *Governance* pada wisata religi berbasis nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal juga menjadi pilar penting untuk menjaga legitimasi destinasi di mata peziarah.

Penggabungan ketiga dimensi ESG ini telah menjadi model evaluasi keberlanjutan yang diterapkan secara luas dalam sektor korporat dan mulai diadopsi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Hassan & Meyer (2022) menegaskan bahwa penerapan ESG dalam industri pariwisata dapat menjadi alat ukur baru untuk mengevaluasi keberlanjutan destinasi, serta mengurangi risiko sosial dan lingkungan yang berdampak terhadap reputasi dan daya saing. Meskipun begitu, penelitian yang secara spesifik membahas integrasi ESG dalam pariwisata religi masih sangat terbatas, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia.

### **Teori Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan sebagai Kerangka Analisis**

Teori utama yang digunakan dalam kajian ini adalah teori *Sustainable Tourism*

*Development* (Yoopetch et al., 2023). Teori ini menekankan bahwa pengembangan pariwisata harus mempertimbangkan kesinambungan antara kepuasan wisatawan, pelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat lokal, dan kemampuan daya dukung destinasi dalam jangka panjang. Teori ini mengintegrasikan tiga pilar utama yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial ke dalam model pembangunan pariwisata. Ketiga pilar tersebut pada ESG dapat dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk indikator kuantitatif dan kualitatif yang terukur, sehingga memudahkan proses evaluasi dan implementasi.

### **Pendekatan *Spiritual Ecosystem Services* pada Wisata Religi**

Kajian ini juga menggunakan pendekatan *Spiritual Ecosystem Services* (SES) untuk memahami dimensi keagamaan sebagai bagian dari lanskap sosial dan ekologis destinasi religi. Pendekatan ini menekankan bahwa destinasi religi tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga menyimpan nilai spiritual yang dapat memperkuat ikatan sosial dan kepekaan terhadap alam (W. Wang et al., 2023). Hal ini penting untuk mendasari praktik ESG yang tidak sekadar teknokratis, tetapi juga etis dan berbasis pada nilai transendental.

Penelitian sebelumnya oleh Peristiwa (2023) tentang pariwisata religi di Indonesia menunjukkan pentingnya pelibatan masyarakat dalam tata kelola destinasi untuk menjaga kesinambungan aktivitas keagamaan dan ekonomi. Penelitian Ali et al. (2019) di kawasan religi di Bandar Lampung juga menemukan bahwa keberhasilan pengelolaan destinasi sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat lokal, terutama dalam menjaga otentisitas spiritual sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Kedua penelitian tersebut belum mengintegrasikan secara eksplisit pendekatan ESG dalam kerangka analisisnya, sehingga menyisakan ruang untuk inovasi konseptual dan metodologis dalam penelitian ini. Dalam penelitian lain, Pramezwary et al. (2024) mengusulkan kerangka keberlanjutan destinasi berbasis ESG yang menggabungkan indikator-indikator spesifik seperti efisiensi energi, inklusi gender, kebijakan antikorupsi, serta keberadaan sistem evaluasi dan pelaporan. Penelitian mereka memberikan kontribusi penting dalam memperluas dimensi keberlanjutan yang

sebelumnya terlalu menitikberatkan pada aspek ekologi dan ekonomi semata. Kerangka ini menjadi relevan untuk diadaptasi dalam kajian lokal seperti Kebumen, yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan spiritual yang khas.

ESG dalam pariwisata juga dikaji oleh Ionescu et al. (2019) yang menyatakan bahwa destinasi wisata perlu mengadopsi model ESG secara holistik sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi, mengelola risiko, dan membangun kepercayaan publik. Penelitian mereka menunjukkan bahwa destinasi yang menerapkan ESG secara konsisten cenderung memiliki reputasi lebih baik, serta lebih resilien terhadap perubahan pasar dan regulasi. Hasil penelitian tersebut memperkuat argumen bahwa ESG bukan hanya kerangka evaluatif, tetapi juga strategi pembangunan yang visioner.

Integrasi ESG dalam sektor pariwisata di Indonesia masih dalam tahap awal dan belum merata di seluruh wilayah. Beberapa inisiatif pemerintah daerah menunjukkan arah yang positif, tetapi masih terbatas pada aspek lingkungan seperti penghijauan kawasan wisata dan pengelolaan sampah. Aspek sosial dan *Governance* sering kali terpinggirkan akibat kurangnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan terintegrasi yang mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut melalui desain kebijakan dan program berbasis ESG yang kontekstual dan partisipatif.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik ESG dalam keberlanjutan destinasi wisata religi merupakan bidang kajian yang masih berkembang dan membutuhkan eksplorasi lebih lanjut, terutama dalam kajian lokal seperti Kabupaten Kebumen. Penggabungan teori keberlanjutan dan pendekatan *Spiritual Ecosystem Services* menjadi landasan teoritik yang kuat dalam membangun kerangka analisis yang holistik. Tinjauan literatur ini juga menunjukkan adanya kesenjangan riset dalam hal penerapan ESG secara praktis dan adaptif di destinasi-destinasi religi yang berbasis komunitas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual, empiris, dan praktis terhadap pengembangan destinasi pariwisata religi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi melalui pendekatan ESG.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam praktik integrasi nilai-nilai ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dalam pengelolaan destinasi wisata religi di Kebumen. Penelitian ini dilakukan selama periode Januari hingga April 2025 di beberapa lokasi utama destinasi religi, seperti Makam Syekh Maulana Malik Ibrahim, Masjid Agung Kauman, dan sentra UMKM religius di Kecamatan Kebumen dan Mirit. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap realitas sosial, makna simbolik, serta dinamika praktik ESG dalam kajian lokal dan spiritualitas yang kompleks. Sebagai bukti, data kuantitatif BPS hanya menunjukkan skor agregat ESG yang rendah (misalnya, skor Tata Kelola 2,9 dari 5 pada tahun 2023), tetapi gagal menjelaskan mengapa skor tersebut rendah. Oleh karena itu, penelitian ini mutlak memerlukan pendekatan kualitatif interpretatif, seperti analisis kebijakan, studi kasus implementasi, dan wawancara mendalam dengan para pengelola, tokoh masyarakat, dan wisatawan. Pendekatan ini adalah satu-satunya cara untuk menggali *causal mechanism* (mekanisme kausal) yang tersembunyi, yaitu untuk mengungkap perspektif riil, hambatan komunikasi, dan konflik kepentingan yang menjadi akar lemahnya implementasi ESG di lapangan, suatu hal yang tidak mungkin didapatkan dari survei atau data statistik semata.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap aktivitas pengelolaan lingkungan, interaksi sosial masyarakat lokal, dan proses pengambilan keputusan dalam tata kelola destinasi. Wawancara ini melibatkan 15 informan kunci yang dipilih secara purposif berdasarkan peran aktif mereka dalam pengelolaan destinasi wisata religi di Kebumen. Informan terdiri atas pengelola wisata, tokoh agama, pelaku UMKM religius, perangkat desa, dan perwakilan Dinas Pariwisata. Studi dokumentasi meliputi analisis terhadap peraturan daerah, dokumen rencana pengelolaan destinasi, serta laporan program CSR dan keberlanjutan dari pelaku usaha lokal.

Jenis data yang digunakan mencakup data primer berupa hasil wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder seperti laporan

pemerintah daerah, arsip media lokal, dan publikasi akademik terkait ESG dan pariwisata religi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti mengidentifikasi pola-pola tematik yang berkaitan dengan integrasi ESG dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, serta membandingkan temuan lapangan dengan teori Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik serta member checking kepada informan utama. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman kontekstual dan holistik atas praktik ESG sebagai strategi keberlanjutan destinasi wisata religi di Kebumen.

Penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan teknik (wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta melakukan *member checking* kepada informan utama guna memastikan kesesuaian interpretasi hasil dengan pengalaman empiris mereka untuk menjaga keabsahan data. Pendekatan ini menghasilkan validitas yang kuat dan pemahaman holistik atas praktik integrasi nilai ESG dalam keberlanjutan destinasi wisata religi di Kebumen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Aspek Lingkungan dalam Destinasi Wisata Religi di Kebumen**

Pengelolaan sampah di destinasi wisata religi di Kebumen belum dilakukan secara sistematis dan terpadu. Sebagian besar pengelolaan sampah masih bersifat tradisional dan bergantung pada inisiatif masyarakat atau pengurus tempat ibadah. Tempat-tempat seperti Makam Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Masjid Agung Kauman menerima kunjungan tinggi, terutama pada momen keagamaan tertentu, tetapi tidak memiliki infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Sampah sisa makanan, plastik, dan kertas banyak ditemukan di sekitar area peziarahan dan fasilitas umum.

Ditinjau dari aspek konservasi air dan energi, sebagian besar destinasi belum menerapkan praktik efisiensi secara optimal. Air masih digunakan secara berlebihan, terutama untuk kebutuhan wudhu dan kebersihan, tanpa sistem resirkulasi atau konservasi. Sementara

itu, penggunaan energi listrik di area masjid dan penginapan sekitar destinasi belum didukung oleh teknologi hemat energi atau penggunaan sumber energi terbarukan. Hanya beberapa pesantren yang mulai memanfaatkan panel surya dalam skala terbatas untuk penerangan malam hari.

Perlindungan terhadap kawasan sakral dan alami juga belum menjadi bagian dari kebijakan pariwisata secara eksplisit. Beberapa lokasi wisata religi yang berada di dekat kawasan konservasi alam atau situs bersejarah tidak memiliki sistem zonasi atau pembatasan aktivitas pengunjung. Di Makam Wali di Kecamatan Karanggayam misalnya, area hutan kecil di sekitarnya mulai terganggu oleh pembangunan fasilitas parkir dan kios oleh pihak luar tanpa koordinasi dengan pemerintah desa. Hal ini memperlihatkan lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga dalam menjaga ekosistem lokal yang menjadi bagian integral dari nilai spiritual destinasi.

Temuan-temuan di atas mengindikasikan bahwa meskipun destinasi wisata religi di Kebumen memiliki potensi besar dalam menarik wisatawan, penerapan aspek lingkungan dalam pengelolaan masih bersifat reaktif, tidak terstruktur, dan belum menjadi bagian dari sistem manajemen destinasi secara menyeluruh. Ini menunjukkan bahwa prinsip *Environmental sustainability* dalam ESG belum dijadikan indikator wajib dalam pengembangan pariwisata lokal.

Kurangnya integrasi antara pengelolaan pariwisata dan kebijakan lingkungan dapat menimbulkan kerusakan ekologis yang mengancam keberlangsungan destinasi religi itu sendiri. Ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah wisatawan dan kapasitas lingkungan akan memicu penurunan kualitas kawasan sakral, menurunkan kenyamanan pengunjung, serta mengurangi nilai spiritual destinasi yang seharusnya dijaga.

Penggunaan berlebihan tanpa strategi efisiensi memperlihatkan belum adanya kesadaran ekologis di kalangan pengelola dan pengunjung apabila dilihat dari kajian konservasi air dan energi. Hal ini bertentangan dengan prinsip konservasi yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam agar tetap lestari. Sementara itu, pembangunan infrastruktur tanpa kajian lingkungan, seperti

pelebaran area parkir di zona vegetasi, berpotensi menimbulkan degradasi habitat

alami dan konflik sosial dengan masyarakat adat atau pemangku kepentingan lokal.

**Tabel 2.**  
 Implementasi Aspek Lingkungan (Pilar E) ESG di Wisata Religi Kebumen

<b>Aspek Implementasi (Indikator Kunci ESG)</b>	<b>Makam Syekh Maulana Malik Ibrahim</b>	<b>Masjid Agung Kauman</b>	<b>Lokasi Lain (E.g., Makam Karanggayam, Pesantren)</b>	<b>Temuan Agregat (Tingkat Kabupaten)</b>
Pengelolaan Sampah	Tidak memadai, pengelolaan tradisional. Sampah (plastik, sisa makanan) banyak ditemukan di area ziarah.	Tidak Memadai. Tidak memiliki infrastruktur pengelolaan terpadu. Bergantung inisiatif pengurus.	Tradisional/Inisiatif. Mayoritas bergantung pada inisiatif masyarakat/pengurus, tidak sistematis dan terpadu.	Reaktif dan tidak terpadu. Tidak ada sistem pengelolaan sampah terstruktur dan terpilah di sebagian besar destinasi.
Konservasi Air dan Energi	Tidak Optimal. Penggunaan air berlebihan untuk wudhu tanpa resirkulasi. Energi listrik belum hemat energi.	Tidak Optimal. Penggunaan air berlebihan tanpa konservasi. Minim penerapan teknologi hemat energi.	Heterogen. Hanya beberapa pesantren yang mulai memanfaatkan panel surya skala terbatas. Sebagian besar belum efisien.	Belum efisien. Mayoritas destinasi belum menerapkan praktik efisiensi air (resirkulasi wudhu) atau teknologi hemat energi secara optimal.
Perlindungan Kawasan Sakral/Alami	Lemah. Pengawasan minim di area sekitar.	Rendah. Tidak ada sistem zonasi eksplisit di sekitar fasilitas umum.	Terancam. Contoh di Karanggayam: Pembangunan parkir dan kios mengganggu kawasan hutan kecil di zona vegetasi tanpa koordinasi.	Lemahnya regulasi dan zonasi. Perlindungan kawasan sakral/alami belum menjadi bagian kebijakan eksplisit; lemahnya pengawasan dan koordinasi pembangunan.
Kesimpulan Implikasi ESG	Risiko degradasi ekologis akibat tingginya kunjungan dan minimnya fasilitas.	Risiko penurunan kualitas kawasan akibat tidak seimbangnya kapasitas lingkungan dengan pemanfaatan.	Risiko konflik sosial dan degradasi habitat akibat pembangunan yang tidak terkontrol dan tanpa kajian lingkungan.	Penerapan belum sistematis. Prinsip Environmental Sustainability belum menjadi indikator wajib, menimbulkan kerusakan ekologis dan konflik sosial-lingkungan.

Sumber: Hasil observasi, 2025

Tabel 2 menunjukkan bahwa secara agregat implementasi sub-aspek Lingkungan (E) ESG pada wisata religi Kebumen berada di tingkat implementasi kurang tepat. Meskipun pengelolaan Sampah dan Konservasi Air/Energi mendominasi kelemahan struktural, isu Perlindungan Kawasan Sakral atau Alami menjadi yang paling kritis karena melibatkan kegagalan koordinasi antar-lembaga dan risiko degradasi habitat permanen

Temuan penelitian ini dapat dielaborasi menggunakan kerangka teori *Environmental Sustainability* dalam kajian pengelolaan pariwisata. Menurut Han (2021), pengelolaan destinasi yang berkelanjutan secara lingkungan mencakup pencegahan polusi, efisiensi sumber daya, pelestarian keanekaragaman hayati, serta perencanaan ruang yang berkelanjutan. Dalam teori tersebut, destinasi seharusnya tidak hanya

menjadi objek ekonomi, tetapi juga entitas ekologis yang harus dilindungi.

Pada kajian wisata religi, nilai-nilai spiritual dapat diperkuat melalui praktik konservasi lingkungan. S. Wang et al. (2023) menyatakan bahwa keterhubungan spiritual dengan alam menjadi faktor penting dalam memperkuat ikatan emosional dan tanggung jawab ekologis pengunjung. Artinya, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di tempat suci bukan hanya soal estetika atau kenyamanan, tetapi juga bagian dari penghormatan terhadap nilai religius itu sendiri.

Aspek spiritual dalam wisata religi justru dapat menjadi jembatan untuk memperkuat kesadaran lingkungan. Misalnya, kampanye untuk mengurangi sampah plastik dapat dikaitkan dengan nilai kesucian dan kebersihan dalam ajaran agama. Pemanfaatan air secara bijak dapat diasosiasikan dengan prinsip taharah (kesucian) dalam Islam, yang mengajarkan moderasi dalam penggunaan air meskipun berada di dekat sumber yang melimpah. Karena itu, pendekatan lingkungan dalam pengelolaan wisata religi harus memadukan prinsip teknis konservasi dengan nilai-nilai religius yang hidup di tengah masyarakat. Model ini sejalan dengan pendekatan *Spiritual Ecosystem Services* yang memandang bahwa lanskap alam dan situs sakral adalah satu kesatuan fungsi ekologis dan spiritual yang saling menopang (S. Wang & Blasco, 2022).

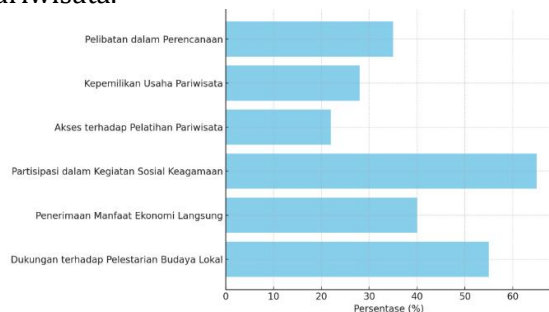
Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Akamavi et al. (2023) yang meneliti dampak kunjungan wisatawan terhadap lingkungan industri. Mereka menemukan bahwa peningkatan jumlah pengunjung tanpa sistem pengelolaan lingkungan yang baik menyebabkan pencemaran dan kerusakan area sekitar makam wali. Penelitian tersebut menegaskan bahwa destinasi religi yang tidak didukung sistem kebersihan dan konservasi yang memadai dapat mengalami degradasi fungsi ekologis dan spiritual. Penelitian oleh Kaharuddin et al. (2020) menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat lokal dalam menjaga lingkungan sekitar situs religi menjadi penentu keberhasilan program pariwisata berbasis komunitas. Mereka menunjukkan bahwa keberlanjutan lingkungan hanya dapat dicapai jika masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pemantauan, dan edukasi lingkungan. Penelitian dari Nofriya &

Fadhly (2021) juga mendukung pentingnya indikator lingkungan dalam evaluasi destinasi berkelanjutan. Mereka mengembangkan kerangka indikator lingkungan yang meliputi efisiensi energi, pengelolaan air, pengurangan limbah, dan pelestarian ekosistem sebagai bagian dari ESG framework untuk pariwisata. Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip lingkungan tidak hanya berlaku untuk destinasi alam atau wisata ekowisata, tetapi juga harus diterapkan pada destinasi berbasis budaya dan spiritual. Temuan lain yang mendukung adalah penelitian Bae (2022) yang menunjukkan bahwa destinasi pariwisata yang mengintegrasikan prinsip ESG secara konsisten, termasuk aspek lingkungan, cenderung memiliki daya tarik yang lebih berkelanjutan, reputasi yang lebih baik, dan risiko sosial-lingkungan yang lebih rendah. Penelitian ini memberi landasan kuat bahwa praktik lingkungan yang baik bukan hanya kewajiban moral dan legal, tetapi juga investasi reputasi jangka panjang bagi destinasi.

Berdasarkan temuan dan hasil riset di atas, implementasi aspek lingkungan dalam destinasi wisata religi di Kebumen masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Tantangan struktural terlihat dari minimnya regulasi lingkungan spesifik dalam kebijakan pariwisata, keterbatasan fasilitas teknis, dan lemahnya kapasitas pengelolaan. Tantangan kultural mencakup rendahnya kesadaran kolektif terhadap pentingnya lingkungan sebagai bagian dari kesucian tempat ibadah. Perlunya integrasi prinsip lingkungan ke dalam kebijakan pariwisata religi lokal melalui pembentukan indikator ESG berbasis komunitas. Pemerintah daerah dapat menyusun regulasi khusus yang mengatur standar pengelolaan sampah, air, dan energi di destinasi religi. Edukasi kepada pengunjung melalui pendekatan keagamaan juga harus diperkuat, misalnya dengan menempatkan pesan-pesan agama yang mengajak menjaga kebersihan dan hemat energi di area publik. Pengelola tempat ibadah dan masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam perencanaan konservasi kawasan melalui program berbasis kearifan lokal dan teknologi sederhana seperti biopori, sumur resapan, dan sistem filtrasi air wudu. Program pelatihan dan pendampingan dari perguruan tinggi serta LSM lingkungan juga dapat menjadi katalisator perubahan perilaku.

## Keterlibatan Sosial dan Pemberdayaan Komunitas Lokal dalam Pengelolaan Wisata Religi di Kebumen

Tingkat keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata religi di Kebumen. Berdasarkan data hasil observasi dan wawancara di sejumlah titik wisata religi seperti Makam Ki Bagus Rangin di Karang Sari, Kompleks Makam Kyai Abdurrahman di Mirit, dan Masjid Agung Kauman di Kebumen Kota, ditemukan bahwa keterlibatan masyarakat berlangsung secara tidak merata dalam berbagai aspek tata kelola. Berikut adalah grafik yang menggambarkan tingkat keterlibatan sosial dan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan wisata religi di Kebumen. Data ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam kegiatan sosial keagamaan dan pelestarian budaya, tetapi masih rendah dalam aspek perencanaan, pelatihan, dan kepemilikan usaha pariwisata.



Gambar 2.

Tingkat Keterlibatan Sosial dan Ekonomi Masyarakat  
Sumber: Hasil observasi, 2025.

Grafik pada Gambar 2 menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam tahap perencanaan program wisata masih rendah, hanya sekitar 35 persen warga yang mengaku pernah dilibatkan dalam forum musyawarah desa atau kegiatan rembuk warga terkait pengembangan destinasi wisata. Sebagian besar warga mengetahui program wisata ketika implementasi sudah berlangsung. Dalam aspek ekonomi, hanya 28 persen warga yang memiliki usaha langsung terkait pariwisata seperti warung makan, penginapan, atau jasa transportasi lokal. Sebanyak 40 persen menyatakan telah memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari keberadaan wisata religi, baik melalui hasil dagangan, jasa parkir, maupun kegiatan pendukung lain. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial keagamaan yang mendukung wisata religi, seperti ziarah massal, tahlilan akbar, dan haul

ulama, tergolong tinggi mencapai 65 persen. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara kegiatan keagamaan dan aktivitas sosial masyarakat. Dalam hal akses terhadap pelatihan atau penguatan kapasitas pariwisata, hanya 22 persen warga yang pernah mengikuti pelatihan dari pemerintah daerah atau lembaga swadaya masyarakat. Ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masih belum menyentuh mayoritas warga secara merata. Pada kegiatan pelestarian budaya lokal, seperti seni tradisi, upacara adat, dan narasi sejarah tokoh lokal, terdapat 55 persen responden yang menyatakan aktif mendukung atau terlibat dalam kegiatan tersebut.

Temuan di atas memperlihatkan bahwa keberadaan destinasi wisata religi di Kebumen memang berdampak terhadap aktivitas sosial masyarakat, tetapi belum sepenuhnya berimplikasi kuat pada aspek pemberdayaan ekonomi dan tata kelola yang inklusif. Partisipasi tinggi dalam kegiatan sosial keagamaan menandakan bahwa wisata religi secara kultural telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat, tetapi pemanfaatan potensi ekonomi dan penataan berbasis masyarakat masih kurang optimal.

Pelibatan dalam perencanaan yang hanya mencapai 35 persen menunjukkan bahwa masyarakat belum ditempatkan sebagai subjek utama dalam pengembangan wisata. Hal ini berpotensi memunculkan resistensi, konflik kepentingan, serta rendahnya rasa memiliki terhadap destinasi. Keterbatasan dalam akses pelatihan juga menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan pariwisata yang diberikan masyarakat, serta memperbesar kesenjangan antar-warga yang sudah terlibat dan yang masih pasif. Tingginya partisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan dan pelestarian budaya menjadi modal sosial yang sangat penting. Modal ini dapat menjadi titik masuk strategis untuk memperkuat pemberdayaan berbasis komunitas. Masyarakat dapat terdorong untuk lebih aktif dan mandiri dalam pengelolaan destinasi dengan mengintegrasikan kegiatan religius dan budaya dengan aktivitas ekonomi yang terorganisir.

Temuan ini dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan *Community-Based Tourism (CBT)* dan Teori *Social Capital*. Teori CBT menekankan bahwa keberhasilan pariwisata sangat bergantung pada partisipasi

aktif masyarakat lokal dalam perencanaan, implementasi, hingga evaluasi kegiatan pariwisata (Wani et al., 2024). Dalam kerangka ini, masyarakat bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga menjadi pengambil keputusan. Teori ini selaras dengan dimensi sosial dalam kerangka ESG yang mencakup inklusi sosial, keadilan distribusi manfaat, pelibatan komunitas, dan pelestarian nilai-nilai budaya. Aspek sosial menjadi pondasi keberlanjutan karena menyentuh struktur relasi dan distribusi kekuasaan di tingkat lokal (Baig et al., 2024).

Teori *Social Capital* menggarisbawahi pentingnya jaringan sosial, kepercayaan, dan norma yang menopang kerja sama dalam masyarakat (Zmysłony et al., 2020). Tingginya partisipasi masyarakat Kebumen dalam kegiatan keagamaan dan budaya menunjukkan adanya *bonding social capital* yang kuat, tetapi rendahnya pelibatan dalam pengambilan keputusan menandakan lemahnya *bridging* atau *linking capital*, yaitu koneksi masyarakat ke pemerintah dan lembaga lain yang berwenang. Pengembangan wisata religi di Kebumen perlu diarahkan pada model pariwisata berbasis komunitas yang transformatif, yaitu model yang tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai pelengkap, tetapi sebagai pusat penggerak utama destinasi dengan cara menggabungkan dua kerangka tersebut.

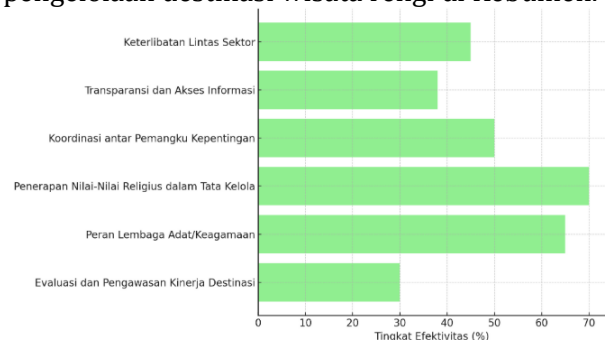
Penelitian ini didukung oleh penelitian Erida et al. (2022) yang menemukan bahwa keberhasilan wisata religi berbasis masyarakat sangat tergantung pada keterlibatan komunitas dalam proses perencanaan dan pengelolaan. Ketika masyarakat hanya dijadikan objek, resistensi dan ketimpangan manfaat menjadi isu utama yang menghambat keberlanjutan. Adinugraha et al. (2020) menegaskan bahwa pelibatan komunitas lokal dalam pengelolaan wisata religi memperkuat identitas budaya dan meningkatkan penghasilan rumah tangga, tetapi harus dilakukan melalui pelatihan dan penguatan kapasitas agar tidak terjadi dominasi oleh pihak luar. Hidayanti & Fitrianto (2022) dalam penelitiannya juga menjelaskan pentingnya pelestarian narasi tokoh lokal dan budaya spiritual sebagai bagian dari daya tarik wisata religi. Ia menunjukkan bahwa ketika masyarakat dilibatkan dalam pelestarian nilai, mereka menjadi lebih memiliki dan menjaga kawasan wisata dari degradasi moral dan komersialisasi berlebihan. Lebih lanjut, Bae

(2022) memperluas pemahaman tentang dimensi sosial ESG dalam pariwisata, termasuk pentingnya indikator partisipasi, keadilan ekonomi, perlindungan hak komunitas, serta pelatihan sebagai bentuk investasi sosial. Penelitian mereka mendukung argumen bahwa dimensi sosial tidak dapat diabaikan dalam menilai keberlanjutan destinasi wisata, termasuk wisata religi.

Keberadaan wisata religi di Kebumen membawa peluang besar dalam memperkuat struktur sosial dan ekonomi masyarakat lokal, tetapi hal ini memerlukan strategi kebijakan yang lebih inklusif dan terarah. Pemerintah daerah dan pengelola wisata perlu menyusun *roadmap* pemberdayaan masyarakat yang mencakup pelatihan rutin, mekanisme partisipasi perencanaan terbuka, dan kemitraan strategis antara komunitas dengan pelaku usaha. Pelestarian nilai budaya dan narasi sejarah tokoh-tokoh lokal perlu digarap secara serius melalui media digital, *event* tahunan, dan program edukatif lintas usia. Sinergi antara tokoh agama, budayawan, pemuda, dan pelaku ekonomi akan menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan pariwisata religi yang berdaya, bermakna, dan berkelanjutan secara sosial.

### Praktik Tata Kelola (*Governance*) dalam Manajemen Destinasi Wisata Religi

Dinamika tata kelola destinasi wisata religi di Kebumen dengan menelaah enam dimensi utama antara lain keterlibatan lintas sektor, transparansi informasi, koordinasi antar-pemangku kepentingan, internalisasi nilai-nilai religius, peran lembaga adat/keagamaan, dan mekanisme evaluasi serta pengawasan. Berikut adalah grafik yang menunjukkan efektivitas aspek tata kelola (*Governance*) dalam pengelolaan destinasi wisata religi di Kebumen.



Gambar 3.

Efektivitas Tata Kelola Destinasi Wisata Religi  
Sumber: Hasil observasi, 2025.

Gambar 3 memperlihatkan bahwa penerapan nilai-nilai religius dan peran lembaga adat/keagamaan mendapat skor efektivitas tertinggi, sementara evaluasi dan pengawasan kinerja destinasi menjadi aspek yang paling lemah. Penerapan nilai-nilai religius dalam tata kelola menjadi aspek yang paling menonjol dengan tingkat efektivitas mencapai 70 persen. Hal ini tercermin dari penggunaan nilai kejujuran, gotong royong, dan amanah sebagai dasar pengambilan keputusan dalam forum desa, serta dalam penyusunan kegiatan keagamaan tahunan. Nilai religius juga mendorong penguatan rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga kesucian dan kelestarian destinasi. Peran lembaga adat dan keagamaan menempati urutan kedua dengan skor efektivitas 65 persen. Lembaga ini umumnya menjadi inisiator kegiatan religi dan penjaga narasi sejarah tokoh lokal. Meskipun tidak seluruhnya memiliki struktur formal, lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam mediasi konflik sosial dan pengawasan moral dalam aktivitas pariwisata. Koordinasi antar-pemangku kepentingan mencatat efektivitas 50 persen. Temuan lapangan menunjukkan bahwa koordinasi berjalan cukup baik di tingkat desa antara tokoh agama, perangkat desa, dan pengelola tempat ibadah, tetapi koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan sektor swasta masih sporadis dan belum berbasis rencana kerja terpadu. Keterlibatan lintas sektor seperti pelibatan BUMDes, koperasi, dan UMKM baru berada pada tingkat efektivitas 45 persen. Banyak inisiatif ekonomi lokal yang berjalan secara individual tanpa koneksi ke jaringan kelembagaan pariwisata kabupaten. Transparansi dan akses informasi masih rendah, dengan tingkat efektivitas hanya 38 persen. Masyarakat umumnya tidak mengetahui secara rinci rencana anggaran pariwisata, perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, atau laporan pertanggungjawaban kegiatan. Hal ini diperparah oleh minimnya dokumentasi digital dan keterbatasan literasi informasi warga. Yang paling lemah adalah aspek evaluasi dan pengawasan, hanya 30 persen. Tidak ditemukan mekanisme penilaian kinerja secara periodik terhadap pengelolaan destinasi, baik dari sisi fasilitas, pengunjung, maupun kualitas layanan. Evaluasi lebih sering bersifat informal dan tidak terdokumentasi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola destinasi wisata religi di Kebumen lebih banyak ditopang oleh kekuatan nilai dan struktur sosial lokal ketimbang sistem administrasi formal atau perangkat kebijakan pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan nilai-nilai religius dan peran lembaga adat membuktikan bahwa *Governance* di tingkat akar rumput masih hidup melalui mekanisme sosial berbasis kepercayaan dan nilai-nilai agama. Efektivitas tata kelola yang tinggi dalam aspek normatif tidak dibarengi oleh efektivitas dalam aspek struktural dan manajerial. Rendahnya transparansi, lemahnya koordinasi formal, dan tidak adanya mekanisme evaluasi yang sistematis menjadi indikator adanya kesenjangan antara nilai dan sistem. Kurangnya partisipasi lintas sektor dan rendahnya akses informasi juga menunjukkan bahwa proses tata kelola masih cenderung elitis dan tidak sepenuhnya inklusif. Masyarakat hanya mengetahui sebagian kecil dari proses perencanaan dan pengambilan keputusan, yang berisiko menciptakan alienasi sosial serta rendahnya rasa memiliki terhadap pengembangan pariwisata. Kelemahan dalam sistem evaluasi menyebabkan stagnasi kualitas layanan. Tanpa data dan sistem pemantauan, sangat sulit untuk mengetahui keberhasilan program, memetakan kekurangan, dan merumuskan strategi perbaikan secara berkelanjutan. Akibatnya, wisata religi cenderung berkembang secara alami tanpa arah pengembangan yang terukur dan terdokumentasi.

Kerangka teoretis dari *Good Governance in Tourism* seperti yang dikembangkan oleh Topcu et al. (2023) memberikan indikator kunci dalam tata kelola destinasi, yaitu transparansi, akuntabilitas, koordinasi lintas sektor, inklusivitas, dan efektivitas pengambilan keputusan. Teori ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam membangun destinasi yang berkelanjutan. Nilai-nilai spiritual dan norma lokal memiliki potensi sebagai penguat prinsip tata kelola partisipatif pada pariwisata religi. Hal ini sejalan dengan konsep *Religious Governance* yang dikembangkan oleh Sururi (2020), yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip Islam seperti syura (musyawarah), amanah (tanggung jawab), dan *'adl* (keadilan) dapat diintegrasikan ke dalam tata kelola publik. Keberhasilan

penerapan nilai religius harus didukung oleh sistem kelembagaan yang fungsional. Jika tidak, kekuatan nilai tersebut hanya akan menjadi modal sosial tanpa kemampuan implementasi kebijakan. Dalam hal ini, *Governance* harus dipahami sebagai kombinasi antara nilai, sistem, struktur, dan mekanisme evaluatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Murtoyadi et al. (2022) menunjukkan bahwa tata kelola destinasi wisata religi yang berhasil selalu melibatkan koordinasi antar-institusi keagamaan dan pemerintah daerah, serta mekanisme evaluasi yang bersifat kolektif. Mereka menekankan pentingnya “tripartit model” antara negara, komunitas, dan pasar sebagai prasyarat tata kelola yang efektif. Penelitian dari M. K. Hassan et al. (2023) memperkuat bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua indikator ESG yang krusial untuk memastikan distribusi manfaat yang adil dan pencegahan konflik dalam destinasi wisata. Mereka menunjukkan bahwa pengabaian terhadap dua prinsip tersebut seringkali menjadi penyebab utama rusaknya reputasi destinasi dan munculnya ketidakpuasan masyarakat lokal. Slamet et al. (2022) menemukan bahwa nilai religius yang kuat belum tentu menjamin sistem tata kelola yang baik jika tidak ada perangkat kebijakan yang mendukung. Mereka merekomendasikan adanya pelatihan manajemen bagi tokoh agama dan komunitas lokal untuk meningkatkan kapasitas tata kelola. Demikian pula, hasil penelitian Seyfi & Hall (2019) menyatakan bahwa *Governance* tidak cukup hanya berdasarkan niat baik atau nilai tradisional, tetapi memerlukan prosedur tertulis, pembagian peran, indikator kinerja, dan sistem pelaporan publik.

Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata Kebumen, perlu membentuk sistem

tata kelola destinasi religi yang berbasis multi-stakeholder *Governance*. Sistem ini harus mengintegrasikan nilai-nilai religius dengan perangkat manajemen modern seperti sistem pelaporan transparan, forum musyawarah terbuka, dan platform digital partisipatif. Perlu disusun dokumen tata kelola destinasi wisata religi yang berisi pembagian peran, SOP kerja, dan indikator evaluasi yang bisa digunakan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan. Evaluasi kinerja destinasi sebaiknya dilakukan secara rutin dan terbuka, melibatkan tokoh masyarakat, pelaku usaha lokal, dan pihak pemerintah. Penguatan kapasitas tokoh agama dalam hal manajemen, teknologi informasi, dan tata kelola publik menjadi krusial agar mereka tidak hanya menjadi simbol moral, tetapi juga pemimpin strategis dalam pengembangan destinasi. Akhirnya, praktik *Governance* yang diterapkan tidak hanya religius secara nilai, tetapi juga profesional secara sistem. Ini akan menjadikan destinasi wisata religi di Kebumen sebagai model integratif antara spiritualitas dan tata kelola modern.

### **Integrasi Nilai ESG sebagai Strategi Keberlanjutan Destinasi Wisata Religi**

Penelitian ini telah menghasilkan sejumlah temuan penting terkait integrasi nilai-nilai *Environment, Social, and Governance* (ESG) dalam kerangka keberlanjutan destinasi wisata religi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang dilakukan pada beberapa situs religi seperti Makam Ki Mangunwijaya, Goa Jatijajar yang bernuansa spiritual, serta sentra UMKM bernuansa religius menunjukkan bahwa integrasi ESG masih bersifat parsial dan belum membentuk kerangka strategis yang utuh.

**Tabel 3.**  
 Integrasi ESG pada Destinasi Wisata Religi di Kebumen

Aspek	Lokasi Spesifik: Temuan Riset dan Interpretasi	Kesimpulan Agregat (Tingkat Kabupaten)
Lingkungan (E)	Goa Jatijajar (Spiritual Nuance): Sistem pengelolaan limbah dan konservasi air belum optimal.  Situs Ziarah Lain (Misalnya Makam): Masih terdapat praktik pembakaran sampah terbuka di beberapa area sekitar situs.	Aspek paling terabaikan. Pengelolaan lingkungan bersifat reaktif dan tidak terstruktur. Belum ada penerapan prinsip konservasi lingkungan yang menyeluruh, menimbulkan risiko degradasi ekosistem, terutama di situs alami (gua, sumber air), dan merusak pengalaman spiritual pengunjung.

Sosial (S)	<p>Sentra UMKM Religius: Keterlibatan masyarakat lokal cukup tinggi, terutama dalam aspek pelayanan, kuliner halal, dan pengelolaan <i>homestay</i>.</p> <p>Destinasi Umum (Makam, Goa): Fasilitas aksesibilitas untuk kelompok rentan (disabilitas) terbatas, sehingga aspek inklusivitas sosial belum terpenuhi dengan baik.</p>	<p>Berkembang parsial. Dinamika positif didukung oleh pelibatan masyarakat lokal sebagai pelaku ekonomi, memanfaatkan aset sosial kuat (tokoh agama). Namun, inklusivitas sosial rendah karena minimnya infrastruktur ramah disabilitas, literasi digital, dan pelatihan berkelanjutan.</p>
Tata Kelola (G)	<p>Umum (Semua Lokasi): Koordinasi antara pemerintah daerah (Dinas Pariwisata), pengelola wisata, dan komunitas keagamaan masih terfragmentasi.</p> <p>Dokumen: Tidak terdapat dokumen perencanaan strategis jangka panjang yang secara eksplisit mengintegrasikan ketiga nilai ESG.</p>	<p>Kelemahan sentral. Sinergi formal antara pemangku kepentingan tidak ada (fragmentasi koordinasi). Pelaksanaan program keberlanjutan bersifat sektoral dan jangka pendek. Kegagalan utama adalah tidak adanya <i>roadmap</i> atau kebijakan formal ESG yang relevan, menjadikan implementasi nilai ESG tidak menjadi bagian dari visi pembangunan daerah.</p>

Sumber: Hasil observasi, 2025.

Tabel 3 mengindikasikan bahwa integrasi ESG pada destinasi wisata religi Kebumen belum berlangsung secara menyeluruh dan sistematis. Aspek lingkungan merupakan dimensi yang paling terabaikan, padahal keberlanjutan ekosistem sangat penting dalam menunjang kenyamanan dan kelestarian destinasi wisata. Pengelolaan lingkungan yang lemah berpotensi mengganggu pengalaman spiritual pengunjung serta merusak ekosistem lokal, terutama yang berkaitan dengan situs alami seperti gua dan sumber air. Aspek sosial menunjukkan dinamika positif melalui pelibatan masyarakat lokal, tetapi inklusivitas sosial belum sepenuhnya tercapai. Keterlibatan tokoh agama dan komunitas lokal merupakan aset sosial yang kuat, tetapi masih terdapat tantangan dalam penyediaan infrastruktur ramah disabilitas, literasi digital, dan pelatihan berkelanjutan untuk pelaku wisata lokal. Dimensi tata kelola menjadi persoalan sentral dalam pembentukan kerangka keberlanjutan destinasi. Tidak adanya sinergi formal antara pemerintah, pengelola, dan komunitas keagamaan menjadikan pelaksanaan program keberlanjutan bersifat sektoral dan jangka pendek. Kurangnya dokumen rencana aksi ESG atau kebijakan turunan yang relevan menyebabkan integrasi nilai ESG tidak menjadi bagian dari visi pembangunan pariwisata daerah.

Menurut kerangka Teori Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*), keberlanjutan suatu destinasi harus mencakup tiga pilar utama yaitu

keberlanjutan ekologis, sosial-budaya, dan ekonomi yang dikelola dalam tata kelola yang baik (UNWTO, 2023a). Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi ESG di Kebumen masih cenderung memenuhi aspek sosial secara parsial, tetapi belum menjangkau keberlanjutan ekologis dan tata kelola secara komprehensif. Teori ini menekankan pentingnya *stakeholder engagement*, kapasitas kelembagaan, dan *community-based tourism* sebagai landasan penguatan strategi keberlanjutan. Dalam riset di Kebumen, meskipun terdapat pelibatan masyarakat, tetapi kelembagaan destinasi belum cukup kuat. Tanpa mekanisme koordinasi dan evaluasi berbasis ESG, pembangunan destinasi akan tetap bersifat sporadis dan tidak menjamin keberlanjutan jangka panjang.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurnianingtyas & Koko Andika Pratama (2024) yang menunjukkan bahwa pengabaian terhadap aspek lingkungan dan lemahnya tata kelola menyebabkan penurunan kualitas kunjungan wisata spiritual. Penelitian dari Kwon & Shin (2022) menyatakan bahwa tata kelola destinasi yang tidak berbasis nilai ESG berisiko mempercepat degradasi sosial dan budaya lokal. Penelitian oleh C. P. Lin (2021) menemukan bahwa sinergi antara pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan integrasi ESG. Keberadaan forum multi-aktor serta penyusunan *roadmap ESG-based tourism strategy* terbukti mampu meningkatkan kualitas destinasi sekaligus pelestarian nilai-nilai religius. Laporan UNWTO (2023) menekankan bahwa destinasi religi memiliki potensi sebagai

model pariwisata berkelanjutan jika dikelola dengan memperhatikan keseimbangan antara konservasi lingkungan, pemberdayaan sosial, dan tata kelola yang inklusif. Oleh karena itu, Kebumen sebagai wilayah dengan potensi besar di sektor wisata religi perlu merancang kerangka ESG yang disesuaikan dengan karakter lokalitas dan keagamaan masyarakat.

Berdasarkan analisis temuan, terdapat beberapa tantangan utama dalam proses integrasi nilai ESG di destinasi wisata religi Kebumen. *Pertama*, belum adanya indikator ESG yang terstandarisasi untuk mengukur capaian keberlanjutan di sektor pariwisata. *Kedua*, masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam hal pemahaman ESG, terutama pada aspek lingkungan dan tata kelola. *Ketiga*, lemahnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku wisata, komunitas keagamaan, dan akademisi.

Pemerintah daerah bersama Dinas Pariwisata dapat menyusun guideline ESG untuk destinasi wisata berbasis religius, yang mencakup indikator-indikator keberlanjutan, SOP pengelolaan, dan mekanisme evaluasi berkala. Pendidikan dan pelatihan ESG perlu dilakukan secara intensif bagi para pengelola, masyarakat lokal, dan pelaku UMKM. Di samping itu, forum sinergi antara stakeholder perlu dibentuk untuk merumuskan dan memantau strategi keberlanjutan berbasis ESG secara kolektif dan berkelanjutan. Inovasi teknologi juga dapat dioptimalkan dalam mendukung penerapan ESG. Misalnya, penggunaan aplikasi pelaporan keberlanjutan, pemetaan digital kawasan sensitif lingkungan, serta pemasaran destinasi berbasis nilai-nilai keberlanjutan dan spiritualitas. Pendekatan ini dapat memperkuat daya saing destinasi dan meningkatkan kepuasan wisatawan yang kini semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dalam perjalanan mereka (Peeters et al., 2024).

Integrasi nilai-nilai ESG dalam pengembangan destinasi wisata religi di Kebumen masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Aspek sosial merupakan dimensi yang paling berkembang, sementara aspek lingkungan dan tata kelola masih perlu pembedahan mendalam. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan destinasi religi tidak hanya bergantung pada kekuatan spiritual dan budaya lokal, melainkan juga pada kemampuan semua pihak dalam membangun

sistem yang selaras dengan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan. Destinasi wisata religi di Kebumen memiliki peluang besar untuk menjadi model pariwisata yang bukan hanya kompetitif secara ekonomi melalui penguatan integrasi ESG sebagai kerangka strategis, tetapi juga kontributif dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekologi yang harmonis.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip ESG dalam keberlanjutan destinasi wisata religi di Kabupaten Kebumen masih berlangsung secara parsial dan belum terintegrasi dalam kerangka perencanaan strategis yang utuh. Aspek lingkungan merupakan elemen paling lemah, ditandai oleh rendahnya kualitas pengelolaan sampah, tidak optimalnya konservasi air dan energi, serta kurangnya kesadaran ekologis dalam pengelolaan kawasan sakral. Dalam dimensi sosial, keterlibatan masyarakat lokal sudah relatif kuat, terutama dalam kegiatan keagamaan dan pelestarian budaya, tetapi pemberdayaan ekonomi belum merata, dan akses terhadap pelatihan serta pelibatan dalam pengambilan keputusan masih terbatas. Aspek tata kelola menunjukkan dualitas antara kekuatan nilai-nilai religius dan lemahnya sistem manajerial. Nilai kejujuran, amanah, dan gotong royong memang masih menjadi landasan sosial yang hidup dalam pengelolaan, tetapi tidak dibarengi oleh sistem koordinasi, transparansi, dan evaluasi yang terstruktur. Ketiga aspek ESG tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat tetapi belum saling menguatkan secara sistematis. Dengan menggunakan kerangka teori Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dan pendekatan *Spiritual Ecosystem Services*, dapat disimpulkan bahwa destinasi wisata religi di Kebumen memiliki modal sosial dan spiritual yang kuat, tetapi masih membutuhkan instrumen kebijakan, kelembagaan, dan inovasi teknis untuk menjamin keberlanjutan jangka panjangnya. Penelitian ini menjawab permasalahan utama bahwa belum adanya integrasi ESG menyebabkan pengelolaan destinasi berjalan sektoral, tidak efisien, dan rentan terhadap degradasi nilai-nilai religi, ekologi, dan sosial di Kabupaten Kebumen. Oleh

karena itu, integrasi ESG yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis nilai lokal merupakan strategi yang mendesak untuk diimplementasikan di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Kebumen.

### **Saran**

Pemerintah Kabupaten Kebumen, melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, harus segera mengalihkan paradigma pengelolaan destinasi dari reaktif menjadi kerangka strategis yang komprehensif dan terintegrasi ESG. Pihak berwenang perlu mewajibkan penerapan sistem pengelolaan sampah terpilah dari sumbernya dan mendirikan fasilitas daur ulang lokal di lokasi utama seperti Makam Syekh Maulana Malik Ibrahim untuk mengatasi aspek lingkungan yang masih menjadi elemen paling lemah, dengan melibatkan langsung UMKM lokal dalam rantai pengumpulan dan pengolahan. Upaya aktif untuk mencapai target konservasi air dan efisiensi energi menuntut pemasangan sistem low-flow pada fasilitas wudhu dan eksplorasi adopsi panel surya skala terbatas pada infrastruktur keagamaan utama, yang harus selaras dengan nilai-nilai spiritual seperti thaharah.

Pada dimensi Sosial, guna meningkatkan inklusivitas dan pemberdayaan, Dinas Pariwisata wajib menyusun peta jalan Pariwisata Berbasis Komunitas (CBT) yang secara eksplisit menjamin bahwa masyarakat lokal, melebihi tingkat pelibatan saat ini yang hanya sekitar 35% menjadi subjek utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan program pariwisata baru. Hal ini melibatkan pembentukan dana bergulir khusus untuk pelatihan vokasi dan literasi digital di sektor jasa pariwisata, dengan memprioritaskan pemuda dan perempuan lokal untuk memastikan distribusi manfaat ekonomi yang merata. Yang krusial, alokasikan anggaran segera untuk memasang infrastruktur yang dapat diakses, seperti ramp dan fasilitas khusus, di situs-situs seperti Goa Jatijajar untuk memenuhi mandat inklusi sosial bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas yang masih terbatas aksesibilitasnya.

Terakhir, Pemerintah harus secara formal membentuk Forum Tata Kelola Multi-Pemangku Kepentingan di mana perwakilan komunitas agama, pemerintah daerah, sektor swasta, dan akademisi bersama-sama menyusun Dokumen

Rencana Pengelolaan Destinasi (DMP) berbasis ESG yang transparan dan dapat diakses publik untuk memperkuat Tata Kelola (*Governance*). Rencana ini harus merinci peran, tanggung jawab, dan indikator kinerja yang jelas untuk ketiga pilar ESG, menggantikan sistem informal yang ada. Implementasi sistem pelaporan digital yang rutin untuk aktivitas keuangan dan metrik kinerja akan secara signifikan meningkatkan transparansi dan pengawasan yang saat ini paling lemah. Intervensi sistematis ini akan efektif menjembatani kesenjangan antara modal spiritual Kebumen yang kuat dengan praktik struktural yang diperlukan untuk keberlanjutan jangka panjang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adinugraha, H. H., Nasarruddin, R. Bin, & Shulthoni, M. (2023). Halal Tourism in Malaysia: Its Development and Strategy. *Social Sciences and Education Research Review*, 10(1).
- Adinugraha, H. H., Nasarruddin, R. Bin, Shulthoni, M., & Andrean, R. (2023). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pariwisata Halal di Indonesia: Sebuah Analisis Bibliometrik. In A. Mulyono, A. M. Dja'far, & F. S. Alim (Eds.), *Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer* (1st ed., pp. 127–163). Kementerian Agama RI.
- Adinugraha, H. H., Rofiq, A., Ulama'i, A. H. A., Mujaddid, A. Y., & Srtika, M. (2020). Community-Based Halal Tourism Village: Insight from Setanggor Village. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 129–154.
- Akamavi, R. K., Ibrahim, F., & Swaray, R. (2023). Tourism and Troubles: Effects of Security Threats on the Global Travel and Tourism Industry Performance. *Journal of Travel Research*, 62(8). <https://doi.org/10.1177/00472875221138792>
- Ali, S., Maharani, L., & Untari, D. T. (2019). Development of religious tourism in Bandar Lampung, Indonesia. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 8(5).
- Bae, J. H. (2022). Developing ESG Evaluation Guidelines for the Tourism Sector: With a Focus on the Hotel Industry. *Sustainability*

- (Switzerland), 14(24).  
<https://doi.org/10.3390/su142416474>
- Baig, S., Ali, A., & Khan, S. U. (2024). Exploring the interplay of tourism impacts, quality of life, and community engagement in developing sustainable nature-based tourism in Pakistan. *GeoJournal*, 89(1).  
<https://doi.org/10.1007/s10708-024-11025-6>
- BPS Kabupaten Kebumen. (2024). *Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara dengan Tujuan Kabupaten Kebumen*. Report.  
<https://kebumenkab.bps.go.id/id/statistic-s-table/2/NzcxIzI=/jumlah-perjalanan-wisatawan-nusantara-dengan-tujuan-kabupaten-kebumen.html>
- Dempere, J., & Modugu, K. (2022). Tourist destination competitiveness and ESG performance in the airline industry. *Problems and Perspectives in Management*, 20(4).  
[https://doi.org/10.21511/ppm.20\(4\).2022.12](https://doi.org/10.21511/ppm.20(4).2022.12)
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebumen. (2024). *Data Statistik Sektor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebumen*. Report.  
<https://disparbud.kebumenkab.go.id/index.php/web/category/data-statistik-sektoral>
- Erida, E., Sukmawati, N., Kartika Wulan Bahyangkari, S., & Hendriyadi, H. (2022). Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mendukung Desa Penengah sebagai Desa Wisata Agro dan Religi di Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Inovasi, Teknologi Dan Dharma Bagi Masyarakat*, 4(1).  
<https://doi.org/10.22437/jitdm.v4i1.19536>
- García, C. J., Herrero, B., & Morillas-Jurado, F. (2024). The impact of the environmental, social, and governance dimensions of sustainability on firm risk in the hospitality and tourism industry. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 31(4).  
<https://doi.org/10.1002/csr.2715>
- Han, H. (2021). Consumer behavior and environmental sustainability in tourism and hospitality: a review of theories, concepts, and latest research. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(7).  
<https://doi.org/10.1080/09669582.2021.1903019>
- Hassan, A. S., & Meyer, D. F. (2022). Does countries' environmental, social and governance (ESG) risk rating influence international tourism demand? A case of the Visegrád Four. *Journal of Tourism Futures*.  
<https://doi.org/10.1108/JTF-05-2021-0127>
- Hassan, M. K., Chiaramonte, L., Dreassi, A., Paltrinieri, A., & Piserà, S. (2023). Equity costs and risks in emerging markets: Are ESG and Sharia principles complementary? *Pacific Basin Finance Journal*, 77.  
<https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2022.101904>
- Hidayanti, S., & Fitrianto, A. R. (2022). Community-based tourism (CBT) Pada Kawasan Wisata Religi dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Dedication: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1).  
<https://doi.org/10.31537/dedication.v6i1.656>
- Ionescu, G. H., Firoiu, D., Pirvu, R., & Vilag, R. D. (2019). The impact of ESG factors on market value of companies from travel and tourism industry. *Technological and Economic Development of Economy*, 25(5).  
<https://doi.org/10.3846/tede.2019.10294>
- Juliana, J., W. Mahri, A. J., Salsabilla, A. R., Muhammad, M., & Nusannas, I. S. (2023). The determinants of Muslim millennials' visiting intention towards halal tourist attraction. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(3).  
<https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2021-0044>
- Jung, S., Draper, J., Malek, K., Padron, T. C., & Olson, E. (2024). Bridging Theory and Practice: An Examination of How Event-Tourism Research Aligns With UN Sustainable Development Goals. *Journal of Travel Research*, 63(7).  
<https://doi.org/10.1177/00472875241231273>
- Kaharuddin, K., Pudyatmoko, S., Fandeli, C., & Martani, W. (2020). Partisipasi Masyarakat

- Lokal dalam Pengembangan Ekowisata. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 14(1).  
<https://doi.org/10.22146/jik.57462>
- Khan, M. R., Khan, H. U. R., Lim, C. K., Tan, K. L., & Ahmed, M. F. (2021). Sustainable tourism policy, destination management and sustainable tourism development: A moderated-mediation model. *Sustainability (Switzerland)*, 13(21).  
<https://doi.org/10.3390/su132112156>
- Khusairi, H., Alamin, N., & Azmiya Putri, L. (2023). Community-Based Halal Tourism As A Sustainable Economic Development Strategy. *Ekonomi Islam*, 14(2).  
<https://doi.org/10.22236/jei.v14i2.10931>
- Kurnianingtyas, A. P., & Koko Andika Pratama. (2024). Dampak Pariwisata Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi dan Lingkungan (Studi Kasus di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang). *EDUTOURISM Journal Of Tourism Research*, 5(02).  
<https://doi.org/10.53050/ejtr.v5i02.705>
- Kwon, H. G., & Shin, H. (2022). A Study on the Relationship between ESG Performance Information and Value-Relevance: Focusing on Travel & Tourism Industry in Korea. *Journal of Global Business and Trade*, 18(6).  
<https://doi.org/10.20294/jgbt.2022.18.6.79>
- Legendre, T. S., Ding, A., & Back, K. J. (2024). A bibliometric analysis of the hospitality and tourism environmental, social, and governance (ESG) literature. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 58.  
<https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2024.01.003>
- Lestari, Y. D., Saidah, F., & Aliya Putri, A. N. (2022). Effect of destination competitiveness attributes on tourists' intention to visit halal tourism destination in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*.  
<https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2020-0368>
- Lin, C. P. (2021). The salience of stakeholders in religious tourism: A case study of the Dajia Mazu pilgrimage. *Annals of Tourism Research*, 86.  
<https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.103091>
- Lin, M. S., Zhang, H., Luo, Y., & Li, Y. (2024). Environmental, social, and governance (ESG) measurement in the tourism and hospitality industry: views from a developing country. *Journal of Travel and Tourism Marketing*, 41(1).  
<https://doi.org/10.1080/10548408.2023.2293008>
- Mandić, A., & Kennell, J. (2021). Smart governance for heritage tourism destinations: Contextual factors and destination management organization perspectives. *Tourism Management Perspectives*, 39.  
<https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100862>
- Mihalic, T. (2024). Metaversal sustainability: conceptualisation within the sustainable tourism paradigm. *Tourism Review*.  
<https://doi.org/10.1108/TR-09-2023-0609>
- Murtayadi, U., Azizurrohman, M., & Supiandi, S. (2022). An Effort to Increase the Role of Halal Tourism: West Nusa Tenggara Islamic Center. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 6(1).  
<https://doi.org/10.18196/jerss.v6i1.13651>
- Nofriya, N., & Fadhly, A. (2021). Proteksi Lingkungan dan Efisiensi Sumber Daya dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman. *CIVED*, 8(3).  
<https://doi.org/10.24036/cived.v8i3.115790>
- Peeters, P., Çakmak, E., & Guiver, J. (2024). Current issues in tourism: Mitigating climate change in sustainable tourism research. In *Tourism Management* (Vol. 100).  
<https://doi.org/10.1016/j.tourman.2023.104820>
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. (2025). *Sejarah*. Article.  
<https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/page/20>
- Peristiwo, H. (2023). Halal Tourism Management Challenges In Realizing Religious Moderation In Indonesia. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*,

- 3(1).  
<https://doi.org/10.30653/ijma.202331.69>
- Pramezwary, A., Pakasi, D., Juliana, Indra, F., Putranto, A. A., & Teguh, F. (2024). Bajamba Traditional Dining Culture of Nagari Jawi-Jawi West Sumatera as a Potential Sustainable Gastronomy Tourism Attraction. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 927 LNNS. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-54009-7\\_42](https://doi.org/10.1007/978-3-031-54009-7_42)
- Rhama, B. (2022). The halal tourism – alternative or mass tourism? Indications of traditional mass tourism on crescent rating guidelines on halal tourism. *Journal of Islamic Marketing*, 13(7). <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2020-0199>
- Rocca, L. H. D., & Zielinski, S. (2022). Community-based tourism, social capital, and governance of post-conflict rural tourism destinations: the case of Minca, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. *Tourism Management Perspectives*, 43. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2022.100985>
- Seyfi, S., & Hall, C. M. (2019). Deciphering Islamic theocracy and tourism: Conceptualization, context, and complexities. *International Journal of Tourism Research*, 21(6). <https://doi.org/10.1002/jtr.2300>
- Sholehuddin, M. S., Munjin, M., & Adinugraha, H. H. (2021). Islamic Tradition and Religious Culture in Halal Tourism: Empirical Evidence from Indonesia. *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 19(1), 79–100. <https://doi.org/10.24090/ibda.v19i1.4470>
- Slamet, Abdullah, I., & Laila, N. Q. (2022). The contestation of the meaning of halal tourism. *Heliyon*, 8(3). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09098>
- Solazzo, G., Maruccia, Y., Lorenzo, G., Ndou, V., Del Vecchio, P., & Elia, G. (2022). Extracting insights from big social data for smarter tourism destination management. *Measuring Business Excellence*, 26(1). <https://doi.org/10.1108/MBE-11-2020-0156>
- Sururi, A. (2020). Collaborative Governance Actor in the Revitalization Program of Old Banten Religious Tourism Area. *Policy & Governance Review*, 4(2). <https://doi.org/10.30589/pgr.v4i2.216>
- Tong, L., Yan, W., & Manta, O. (2022). Artificial Intelligence Influences Intelligent Automation in Tourism: A Mediating Role of Internet of Things and Environmental, Social, and Governance Investment. *Frontiers in Environmental Science*, 10. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.853302>
- Topcu, M., Denaux, Z., & Crews, C. (2023). Good governance and the us tourism demand. *Annals of Tourism Research Empirical Insights*, 4(1). <https://doi.org/10.1016/j.annale.2023.100095>
- UNWTO. (2023a). *145 Key Tourism Statistics*. World Tourism Organization.
- UNWTO. (2023b). Tourism Set to Return to Pre-Pandemic Levels in Some Regions in 2023. *World Tourism Organization*.
- Wang, S., & Blasco, D. (2022). East meets West: Spiritual tourism in Chinese protected areas. *Annals of Tourism Research Empirical Insights*, 3(1). <https://doi.org/10.1016/j.annale.2022.100035>
- Wang, S., Blasco, D., Hamzah, A., & Verschuuren, B. (2023). Tourists and ‘philosophers’: Nature as a medium to consciousness and transcendence in spiritual tourism. *Annals of Tourism Research*, 99. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2023.103543>
- Wang, W., Wu, C., Fang, Q., & Harrison, O. I. (2023). Cultural ecosystem services evaluation in a coastal city of China using social media data. *Ocean and Coastal Management*, 242. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106693>
- Wani, M. D., Batool, N., Dada, Z. A., & Shah, S. A. (2024). Investigating the impact of community-based tourism on the residents’ quality of life and their support for tourism. *Community Development*, 55(1).

<https://doi.org/10.1080/15575330.2023.2272271>

(Switzerland), 12(6).  
<https://doi.org/10.3390/su12062310>

World Economic Forum. (2024). Global Risks Report 2024 | World Economic Forum | World Economic Forum. In *World Economic Forum* (Issue January).

Yoopetch, C., Kongarchapatara, B., & Nimsai, S. (2023). Tourism Forecasting Using the Delphi Method and Implications for Sustainable Tourism Development. *Sustainability (Switzerland)*, 15(1). <https://doi.org/10.3390/su15010126>

Yuan, J., Al Shraah, A., Kuo, Y. K., Muda, I., Mabrouk, F., Espinoza-Maguiña, M., & Abdulrehman, N. (2023). Effects of ecological innovation, governance structure, and social development on the adoption of sustainable reporting in the global tourism industry. *Economic Research-Ekonomiska Istrazivanja*, 36(2). <https://doi.org/10.1080/1331677X.2023.2179092>

Zmysłony, P., Leszczyński, G., Waligóra, A., & Alejziak, W. (2020). The sharing economy and sustainability of Urban destinations in the (over)tourism context: The social capital theory perspective. *Sustainability*

#### **BIODATA PENULIS**

Hendri Hermawan Adinugraha, lahir pada tanggal 11 Maret 1987 di Kabupaten Serang. Doktor Studi Islam dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Bekerja di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sebagai Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Muhammad Khoirul Fikri, lahir pada tanggal 12 Februari 1990 di Kabupaten Batang, Magister Ekonomi Syariah dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bekerja di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sebagai Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Rizky Andrian, lahir pada 6 November 1999 di Kabupaten Pekalongan. Menempuh Program Double Degree pada Program Studi Master in Islamic Finance and Banking Universiti Utara Malaysia dan Magister Ekonomi Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung melalui Beasiswa Indonesia Bangkit, Kolaborasi Kementerian Agama-LPDP RI.